

A

RUANG PUBLIK ALTERNATIF SEBAGAI INSTRUMEN CIVIL SOCIETY DI KOTA SURABAYA

(Studi Kasus Forum Kota Surabaya dan Dewan Kota Surabaya)

SKRIPSI

FK
FIS P 14/02
R00
r



Diajukan Oleh :

Niken Rooshany
NIM : 079615121

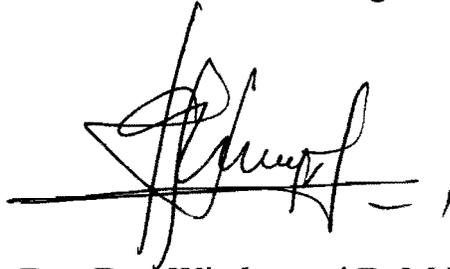


**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini setuju untuk diujikan
Surabaya 20 juni 2002

Dosen Pembimbing



Drs. Dwi Windyastuti B, MA
NIP.131801643

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

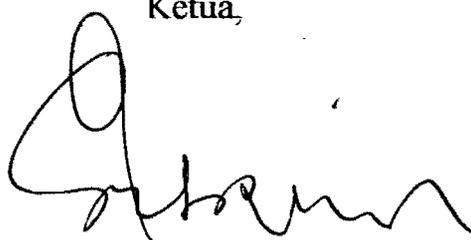
**Ruang Publik Alternatif Sebagai
Instrumen Civil Society di Kota Surabaya**

(Studi Kasus Dewan Kota Surabaya dan Forum Kota Surabaya)

Telah dipertahankan di depan Komisi Penguji
Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2002, pukul 11.00-13.00 WIB

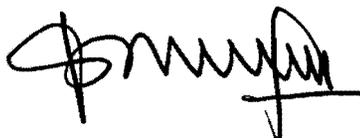
Komisi Penguji,

Ketua,



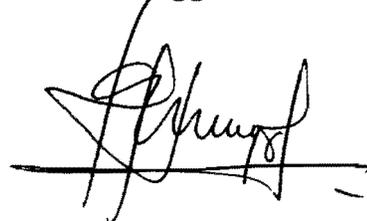
(Drs. Sutrisno NP, Msi)
NIP.130937951

Anggota,



(Drs. Budi Prasetyo, Msi)
NIP: 131918696

Anggota,



(Drs. Dwi Windyastuti B, MA)
NIP.131801643

ABSTRAKSI

Realitas dan pengalaman menunjukkan bahwa kinerja real dari DPRD dan pemerintah daerah menunjukkan transformasi yang masih di luar jangkauan. Kehadiran ruang publik yang otonom, diharapkan dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah setempat, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Melalui langkah pendekatan partisipasi masyarakat. Cita-cita yang hendak dicapai dalam ruang publik otonom ini adalah membangun masyarakat warga (*civil society*). Konsep suatu bangsa yang semua unsurnya ikut berpartisipasi merumuskan kepentingan bersama.

Forum Kota Surabaya (FKS) dan Dewan Kota Surabaya (DKS) merupakan aliansi berbagai *stakeholder* yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kota Surabaya. Keberadaan FKS dan DKS yang masih belum bisa diterima oleh lembaga legislatif, menyebabkan berbagai masukan nota bene merupakan aspirasi dari warga, tidak bisa tersalurkan dengan baik. Di sisi lain FKS dan DKS telah mampu mendorong masyarakat untuk berfikir kritis.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan ruang publik otonom di Surabaya berjalan kurang efektif. Berbagai masalah pendanaan, persoalan struktur yang tidak jelas, kapabilitas para penyelenggara ruang publik menjadi pertanyaan. FKS terpaksa harus membubarkan diri setelah berjalan kurang dari satu tahun, karena tidak adanya sumber dana yang dapat menggerakkan organisasi itu. Kemudian lahir ruang publik baru, DKS. Namun sepanjang perjalanan, keberadaan DKS masih jauh dari yang diharapkan. Terutama perannya sebagai *pressure group*.

Untuk mewujudkan peran dan fungsi ruang publik diperlukan adanya jaringan kerja yang mantap yang dapat menjadi mendesak apa yang sudah menjadi kesepakatan warga terhadap pemerintah setempat maupun pemerintah pusat.